

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah usaha memfasilitasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang akan dihadapinya di masa yang akan datang. Tentu dengan harapan agar peserta didik dapat menjadi lebih baik, dapat mengembangkan potensi dirinya dan bermanfaat untuk lingkungannya. Negara sebagai institusi yang mempunyai tanggung jawab untuk mengayomi masyarakatnya menciptakan usaha-usaha agar seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat memfasilitasi terselenggaranya pendidikan. Harapannya pendidikan dapat mengantarkan negeri ini menjadi negeri yang lebih maju dan sejahtera. Hal ini secara eksplisit dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, pemerintah dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bab IV pasal 10-11 menetapkan bahwa:

Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 10) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (Pasal 11 ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (Pasal 11 ayat 2).

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, seperti termaktub dalam UUD 1945. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya perbaikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal penyempurnaan system pendidikan. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan pergeseran paradigma pengelolaan system pendidikan dari sentralistik ke arah desentralistik.

Masa otonomi daerah ini ditandai dengan implementasi UU No.22 tahun 1999 yang direvisi dan diganti dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur konsep, sistem dan pola pendidikan, pembiayaan pendidikan, juga kewenangan di sektor pendidikan yang digariskan bagi pusat maupun daerah. Desentralisasi pendidikan menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengelolaan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah, yang menempatkan kabupaten/kota sebagai titik berat desentralisasi.

Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan era otonomi daerah ini adalah dengan diterapkannya konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam menyikapi kebijakan desentralisasi dalam bidang pendidikan ini, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan No. 420/Kep. 2556-Disdik/2001 tentang penerapan MBS di Jawa Barat. Adanya Surat Keputusan (SK) tersebut merupakan salah satu kebijakan strategis Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tingkat satuan pendidikan (sekolah). Keputusan tentang Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Jawa Barat ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan kualitas pendidikan dalam kerangka otonomi daerah. Inti dari MBS adalah pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu manajemen pendidikan yang berbasis pada kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Selain itu implementasi MBS mengandung misi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas selain orangtua siswa dalam mewujudkan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari seluruh perangkat yang ada dalam konsep Manajemen Berbasis Sekolah sesuai dengan

karakteristik sekolah yang bersangkutan.

Mengingat pentingnya partisipasi seluruh warga sekolah dan masyarakat dalam memajukan pendidikan di sekolah, maka sebagai konsekuensi dalam mengakomodasi aspirasi, harapan, dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap sekolah maka perlu adanya suatu wadah untuk menampung dan menyalurkannya. Dalam implementasi MBS wadah ini disebut dengan komite sekolah. Keberadaan komite sekolah sangat diperlukan dalam rangka mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah. Ini artinya bahwa peran masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.

Komite sekolah merupakan bentuk partisipasi masyarakat luas yang terdiri dari unsur-unsur orangtua siswa, wakil siswa, wakil guru, kepala sekolah, wakil tokoh masyarakat setempat (ulama, budayawan, pemuka adat dan cendikia pemerhati pendidikan, wakil masyarakat terinstitusi (lurah, camat dan pejabat lainnya yang ada diwilayah sekolah), dan ulama, pejabat pendidikan (Dinas Pendidikan).

Komite sekolah mempunyai tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam peraturan tersebut, tersirat pula ketentuan mengenai keikutsertaan komite sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Atas dasar tersebut, maka komite sekolah perlu melakukan pengelolaan keuangan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan, khususnya dana bantuan yang berasal dari pemerintah atau yang disebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kebijakan baru pemerintah mengenai dana bantuan operasional sekolah ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 160/MPN/DS/2005 yaitu bahwa:

Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional akan memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang akan dimulai pada awal tahun pelajaran 2005/2006.

Program Bantuan Operasional Sekolah dimaksudkan untuk membantu meringankan beban pendidikan rakyat miskin agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah, kekurangan fasilitas belajar mengajar dan dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan dasar. Dana bantuan operasional tersebut dialokasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Negara ini.

Kondisi di lapangan menurut laporan berbagai media, dalam pelaksanaan program tersebut masih ditemukan berbagai masalah. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008 sebagaimana dilansir Harian "Nusantaraku" (2 Juli 2009) (www.nusantaranews.wordpress.com) menemukan banyak penyelewengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) seperti sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS dan DPL, sekolah tidak menggratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya, dan dana BOS digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Selain itu masalah lainnya adalah kurangnya pelibatan Komite sekolah sebagai alat kontrol dalam pengelolaan dana BOS. Hasil riset Indonesia

Corruption Watch (ICW) di 10 kabupaten/kota di Indonesia sebagaimana dilansir Harian “Analisa” (12 Juli 2007) (www.aceh-eye.org) menyebutkan selain tidak mengetahui tentang komite sekolah, sebanyak 78,4 persen orang tua murid tidak mengetahui mekanisme penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). ICW menyatakan pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sarat dengan praktek korupsi karena tingginya kekuasaan dan monopoli kepala sekolah serta rendahnya transparansi pengelolaan dana BOS. Salah satu indikator transparansi pengelolaan dana BOS adalah eksistensi Komite Sekolah. Komite sekolah dibentuk dari stakeholder sekolah, yaitu guru dan orang tua murid. Namun, dalam kenyataannya banyak orang tua murid tidak mengetahui keberadaan dan fungsi komite sekolah. ketidaktahuan itu adalah kesengajaan dari kepala sekolah dan pejabat sekolah lainnya yang merasa takut terhadap kontrol kebijakan yang akan dijalankan oleh komite.

Pemanfaatan dana BOS harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan Komite Sekolah. Hal itu dimaksudkan agar ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Dampak dari tidak adanya keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS memungkinkan terjadinya praktik korupsi berkedok Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Contohnya adalah dalam bentuk penyusunan RAPBS. Hal itu bisa terlihat dalam pembahasan RAPBS yang kerap tidak transparan dan tidak melibatkan komite sekolah. Padahal pihak sekolah seharusnya melibatkan komite sekolah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sehingga

dalam proses perumusannya komite sekolah dan orangtua murid mengetahui secara jelas program-program sekolah beserta pendanaanya.

Dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana komite sekolah mempunyai kontribusi terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan berjudul: “Kontribusi Kinerja Komite Sekolah Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Dayeuh Kolot Kab. Bandung.”

B. RUMUSAN MASALAH

Agar permasalahan yang akan dibahas tidak terlampaui luas ruang lingkupnya dan mampu memperoleh kejelasan mengenai masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung?
3. Seberapa besar kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi secara jelas dan fakta mengenai kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Dayeuh Kolot Kab. Bandung yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat keputusan pemecahan masalah terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komite sekolah.

2. Tujuan Khusus

Tujuan umum di atas dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai kinerja komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung.
2. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan memadai mengenai pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung
3. Untuk mengetahui besaran kontribusi kinerja komite sekolah terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Dayeuh Kolot Kab. Bandung.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat memberikan

masuk dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yang berkualitas di Kabupaten Bandung. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Melalui proses penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu Administrasi Pendidikan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumber masukan yang sangat berarti bagi kepala sekolah dan komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh Kolot Kab. Bandung.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga yang terkait dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

E. ANGGAPAN DASAR

Dalam setiap penelitian perlu ditunjang oleh beberapa asumsi atau anggapan dasar agar penelitian tersebut memiliki landasan yang kuat dengan pokok-pokok penelitian yang jelas dan aspek-aspek yang tegas. Anggapan dasar tersebut merupakan titik tolak pemikiran dalam suatu penelitian yang kebenarannya tidak diragukan lagi oleh peneliti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto (1997:49) bahwa :

Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas untuk memperkuat permasalahan dan membantu penelitian dalam menetapkan objek penelitian di wilayah pengambilan data instrument dan pengumpulan data.

Untuk memperkuat penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa anggapan dasar dalam penelitian ini, yaitu :

1. Komite sekolah merupakan suatu lembaga untuk mengkoordinir dan

membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan lembaga sekolah serta berfungsi sebagai wadah dari para stakeholder dalam menjalankan tugasnya untuk membantu sekolah meningkatkan kinerjanya bagi terwujudnya layanan pendidikan dan hasil belajar yang bermutu.

2. Komite sekolah merupakan perwujudan partisipasi seluruh peran masyarakat dalam pendidikan. Paradigma yang dibangun adalah masyarakatlah yang menjadi pengelola, penyelenggara sampai pengontrol system pendidikan di sekolah (Dinas Pendidikan provinsi jawa barat, 2004:112).
3. Dana merupakan salah satu sumberdaya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisensi pengelolaan pendidikan (E. Mulyasa, 2002:167).
4. Pengelolaan biaya pendidikan merupakan pengelolaan keuangan yang terdiri dari penganggaran dan pengawasan keuangan yang ditujukan untuk kelangsungan pendidikan secara efektif dan efisien di sekolah.

F. HIPOTESIS PENELITIAN

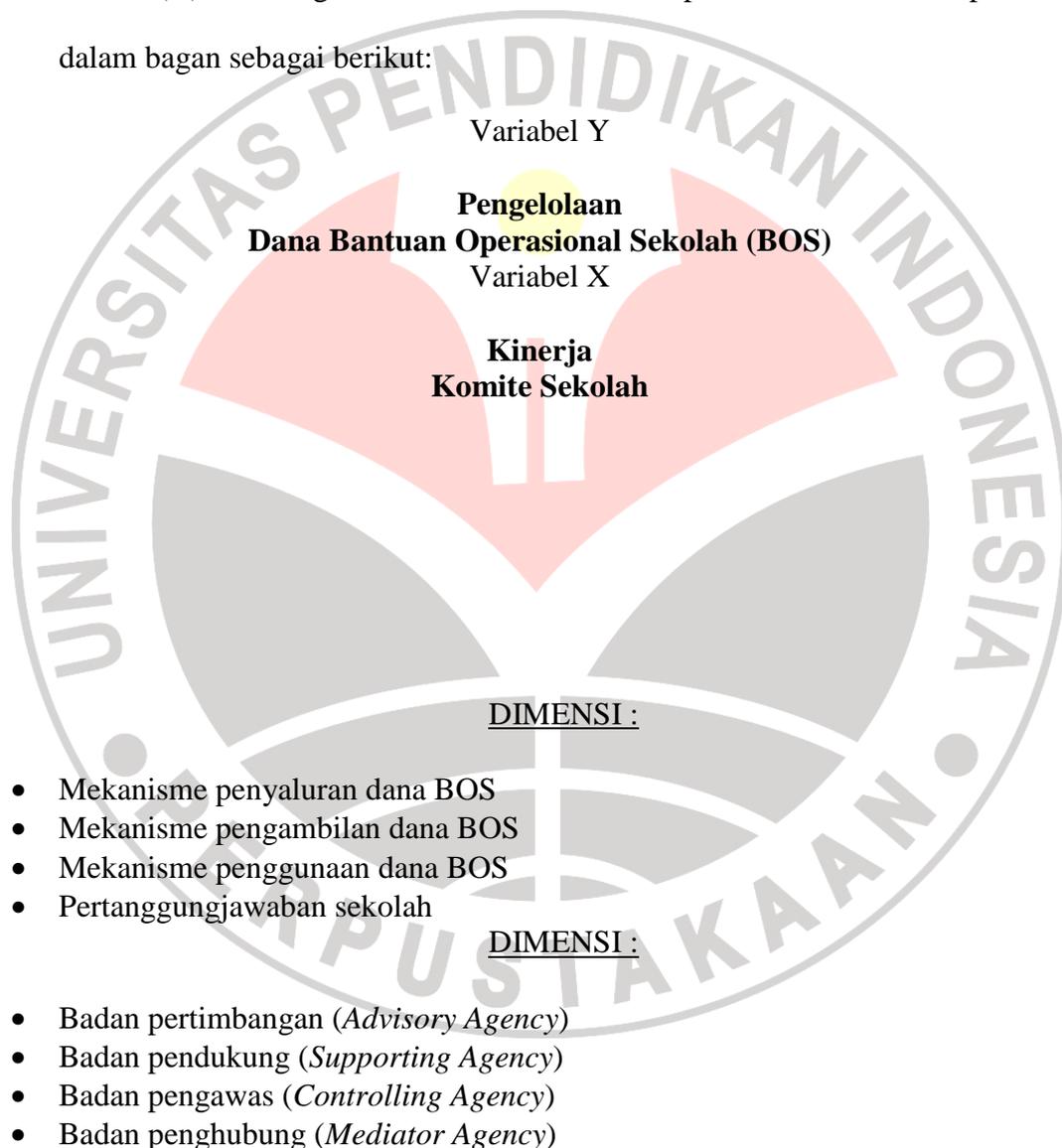
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang perlu diuji kebenarannya. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009: 84) bahwa:

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: “Kinerja komite sekolah berkontribusi positif dan

signifikan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Dayeuh kolot Kab. Bandung.”

Kinerja komite sekolah merupakan variable bebas (X), sedangkan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan variabel terikat (Y). Hubungan antara kedua variable penelitian tersebut dipetakan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Hubungan antara Variabel X terhadap Variabel Y

Keterangan:

= Kontribusi kinerja komite sekolah (variable X), terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (variable Y).

G. METODE PENELITIAN

● Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan, mengorganisasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang diuraikan oleh Winarno Surakhmad (1994:140) bahwa:

Metode merupakan suatu cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk mengkaji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cara utama ini di gunakan setelah penyelidik memperhitungkan kewajaran dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan ditunjang oleh studi kepustakaan. Metode

deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha untuk dapat menggambarkan secara jelas tentang masalah atau kejadian yang berlangsung pada saat sekarang. Pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan dilakukan pencatatan dan penganalisaan data hasil penelitian secara eksak dengan menggunakan perhitungan statistik. Sedangkan, studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lebih jelas melalui pengkajian terhadap berbagai konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

H. LOKASI, POPULASI DAN SAMPEL

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah objek penelitian yang berupa manusia, gejala, benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya. Sugiyono (2009:61) mengemukakan bahwa: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya."

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, maka yang akan menjadi populasi dan berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah

kepala sekolah dan ketua komite sekolah di Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung.

3. Sampel

Sampel penelitian merupakan sebagian dari populasi yang dianggap mewakili menurut ketentuan tertentu untuk diambil datanya oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Sugiyono (2009:62) yang menyatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.

Perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *teknik probability sampling* dengan cara *proportionate stratified random sampling*. Sebagaimana dikemukakan Akdon & Sahlan Hadi dalam buku Aplikasi statistik dan metode penelitian untuk administrasi dan manajemen (2005:100) “*Proportionate stratified random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak dan berstrata secara proposional dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis).

